

LAPORAN TATA KELOLA TAHUN 2023



PT. BPR Ana Artha

SEHAT | BESAR | KUAT

Desember 2023

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	4
A. Pendahuluan	4
B. Latar Belakang	5
C. Fungsi Pedoman Kebijakan & Prosedur Tata Kelola	6
D. Dasar Hukum Kebijakan Tata Kelola	6
E. Anggaran Dasar	7
F. Prinsip-Prinsip Tata Kelola	7
1. <i>Transparansi (Transparency)</i>	7
2. <i>Akuntabilitas (Accountability)</i>	8
3. <i>Pertanggungjawaban (Responsibility)</i>	8
4. <i>Independensi (Independency)</i>	8
5. <i>Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)</i>	9
G. Penilaian Penerapan Tata Kelola di BPR Ana Artha	9
BAB II PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR ANA ARTHA	11
A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola	11
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	11
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	12
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	13

i. Tugas dan Tanggung Jawab Komite	13
ii. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite.....	13
iii. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite	13
B. Kepemilikan Saham Anggota Direksi Pada BPR.....	14
C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi Dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi Lain dan/atau Pemegang Saham BPR.....	15
D. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris Pada BPR dan/atau Perusahaan Lain	16
E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham	17
F. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS	18
G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah.....	19
H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris	19
I. Jumlah Penyimpangan Intern yang Terjadi dan Upaya Penyelesaian oleh BPR	20
J. Jumlah Permalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh BPR	20
K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	21
L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik, Baik Nominal maupun Penerima Dana	21
M. Kesimpulan Umum Hasil <i>Self Assessment</i> Pelaksanaan Tata Kelola.....	21

BAB I PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Untuk meningkatkan kinerja Bank dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, maka BPR Ana Artha sesuai ketentuan OJK mewajibkan untuk melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip Tata Kelola Perusahaan yang meliputi 5 (lima) pilar utama yaitu Transparansi (*transparency*), Akuntabilitas (*accountability*), Pertanggungjawaban (*responsibility*), Independensi (*independency*) dan Kewajaran (*fairness*).

Manajemen PT BPR Ana Artha sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu POJK No.4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola BPR menilai bahwa Tata Kelola wajib untuk dilaksanakan di lingkungan BPR Ana Artha mengingat bahwa BPR sebagai salah satu industri perbankan dan sebagai lembaga intermediasi sektor keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian di daerah khususnya di wilayah kerja PT. BPR Ana Artha.

Semakin meningkatnya volume usaha harus diimbangi dengan pengelolaan yang memadai serta pelaksanaan Tata Kelola secara berkesinambungan dari waktu ke waktu, maka semakin baik dalam pelaksanaannya tentu akan memberikan hasil yang optimal bagi perkembangan BPR yang akan datang.

B. Latar Belakang

BPR merupakan bank yang dalam aktivitasnya menerima simpanan dalam bentuk tabungan, deposito berjangka dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit.

Untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap aspek pengelolaan perusahaan, BPR menyadari bahwa keberlangsungan eksistensi perusahaan tidak hanya diukur dari performa keuangan, dan peningkatan keuntungan, melainkan juga melalui performa internal perusahaan yaitu etika dan Tata Kelola.

Guna mendukung tercapainya tujuan perusahaan, BPR menetapkan komitmen untuk menjalankan sistem perbankan yang sehat dengan berlandaskan pada pengimplementasian prinsip-prinsip Tata Kelola. Melalui implementasi prinsip-prinsip tersebut secara konsisten dan berkesinambungan diharapkan dapat memaksimalkan *corporate value* dan kepercayaan pasar. Hal ini dilakukan agar Bank memiliki daya saing yang kuat, serta mampu menjaga kelangsungan usaha dalam jangka panjang sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai.

Dalam rangka meningkatkan kinerja BPR, melindungi pemangku kepentingan (*stakeholders*), dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada perbankan, maka BPR Ana Artha menyusun laporan Penerapan Tata Kelola sebagai pemenuhan POJK No.4/POJK.03/2015.

C. Fungsi Pedoman Kebijakan & Prosedur Tata Kelola

Dengan dipatuhinya Kebijakan dan Prosedur Tata Kelola sebagai pedoman pelaksanaan Tata Kelola bagi PT. BPR Ana Artha, sehingga dapat meningkatkan kinerja BPR, melindungi Stakeholder dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada aktivitas operasional BPR, memberikan batasan-batasan dalam operasional agar tidak melanggar terhadap ketentuan-ketentuan yang ada, menjadi kontrol dalam setiap operasional bank.

D. Dasar Hukum Kebijakan Tata Kelola

Penyusunan pelaksanaan di PT. BPR Ana Artha adalah :

1. Undang-undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan UU No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK 03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat yang diberlakukan sejak tanggal 1 April 2015.

- a. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor SEOJK No.5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016, Tentang Penerapan Tata kelola Bank Perkreditan Rakyat.

- b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor SEOJK 24/SEOJK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020, Tentang perubahan atas

SEOJK No.5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015, Tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat.
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor SEOJK No.1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019, Tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat.

E. Anggaran Dasar

1. Modal Dasar
Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah)
2. Modal Disetor
Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)

F. Prinsip-Prinsip Tata Kelola

Sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan, dalam melaksanakan kegiatan usahanya, maka BPR Ana Artha wajib memenuhi sesuai prinsip-prinsip Tata Kelola sebagai berikut :

1. Transparansi (*Transparency*)

Keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Transparansi harus mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat. Transparansi diperlukan agar bank menjalankan bisnis secara objektif, profesional, dan melindungi kepentingan nasabah.

Transparansi dalam operasional di PT. BPR Ana Artha adalah sebagai berikut :

- a. Keterbukaan dalam penyampaian laporan keuangan kepada pihak esktern dan pihak-pihak yang berkepentingan.
- b. Kemudahan mengakses laporan-laporan

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organisasi bank sehingga pengelolaannya berjalan efektif. Akuntabilitas harus mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya.

BPR Ana Artha sebagai Lembaga Kepercayaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan akuntabel kepada *stakeholder*. Untuk itu BPR Ana Artha harus dikelola secara sehat, terukur dan profesional dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah dan pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas dalam pengelolaan BPR merupakan prasyarat yang diperlukan dalam mencapai kinerja BPR yang berkesinambungan.

3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip - prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Responsibilitas harus mengandung unsur kepatuhan terhadap peraturan perundang-undang dan ketentuan internal Bank serta tanggungjawab Bank terhadap masyarakat dan lingkungan. Responsibilitas diperlukan agar dapat menjamin terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang.

4. Independensi (*Independency*)

Pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Independensi mengandung unsur kemandirian dari dominasi pihak lain dan objektivitas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Terkait dengan unsur

independensi tersebut maka BPR Ana Artha mengelola dengan baik dan independen agar masing-masing kepala bagian atau Pejabat Eksekutif beserta seluruh jajaran dibawahnya tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun yang dapat mempengaruhi obyektivitas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

G. Penilaian Penerapan Tata Kelola di BPR Ana Artha

Pelaksanaan Tata Kelola berdasarkan hasil *Self Assessment* meliputi 12 (dua belas) faktor sebagai berikut :

1. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola
 - a. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
 - b. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
 - c. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi
 - a. Kepemilikan saham anggota Direksi pada BPR
 - b. Kepemilikan saham anggota Direksi
3. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi Dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi Lain dan/atau Pemegang Saham BPR

4. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada perusahaan lain
5. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR
6. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris
7. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah
8. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris
9. Jumlah Penyimpangan Intern
10. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh BPR
11. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan
12. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik, Baik Nominal Maupun Penerima Dana.

BAB II PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR ANA ARTHA**A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola**

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Jumlah anggota Direksi PT BPR Ana Artha saat ini belum sesuai dengan ketentuan POJK No.04/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR yang menyebutkan bahwa BPR dengan modal inti kurang dari Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib memiliki 2 (dua) orang Direksi. BPR Ana Artha memiliki 2 (dua) Direktur.

Direktur yang telah memiliki sertifikasi direksi dan telah memenuhi ketentuan yang berlaku serta tidak memiliki rangkap jabatan di bank lain. Direksi diangkat melalui mekanisme dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang berpedoman pada hasil uji kemampuan dan kelayakan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Susunan Direksi sebagai berikut :

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	Nama	Goi Gunawan
	NIK	3671130506650007
	Jabatan	Direktur Utama
2	Nama	Resty Ilyas
	NIK	3275126107880007
	Jabatan	Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
	1) Tugas dan Tanggung Jawab Direksi sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola dan Anggaran Dasar.	
	2) Tugas dan Tanggung jawab Direksi terkait Fungsi Kepatuhan sebagaimana diatur dalam SEOJK Penerapan Fungsi Kepatuhan.	
	3) Tugas dan Tanggung jawab Direksi terkait Manajemen Risiko sebagaimana diatur dalam POJK Manajemen Risiko.	
	4) Tugas dan tanggung jawab Direksi terkait Penerapan APU, PPT dan PPPSPM sebagaimana diatur dalam POJK APU, PPT dan PPPSPM.	

Tindak lanjut dan Rekomendasi Dewan Komisaris :

Direksi telah menindaklanjuti sebagian besar rekomendasi Dewan Komisaris sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rekomendasi kepada Direksi setiap bulan.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Jumlah Dewan Komisaris yang ada pada tahun 2023 sebanyak 2 (dua) orang. Dewan Komisaris telah memiliki sertifikasi Komisaris yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dewan Komisaris diangkat melalui mekanisme dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang berpedoman pada hasil uji kemampuan dan kelayakan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan Anggaran Dasar PT. BPR Ana Artha masa jabatan Dewan Komisaris yakni 3 (Tiga) tahun dan dapat diangkat/ diperpanjang kembali sesuai dengan pertimbangan dari Pemegang Saham. Susunan Dewan Komisaris BPR Ana Artha sebagai berikut :

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	
1.	Nama	Tantina Repi
	NIK	3674067011640002
	Jabatan	Komisaris Utama
2.	Nama	Agus Purnomo Sudyanto
	NIK	3175070908540003
	Jabatan	Komisaris
Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris :		
1) Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola dan Anggaran Dasar.		
2) Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris terkait Manajemen Risiko sebagaimana diatur dalam POJK Manajemen Risiko.		
3) Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait Penerapan APU-PPT sebagaimana diatur dalam POJK APU PPT.		

Rekomendasi kepada Direksi :

Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rekomendasi kepada Direksi setiap bulan.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

PT. BPR Ana Artha belum dibentuk komite-komite dikarenakan modal inti < Rp. 50 Miliar.

i. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
1.	Komite Audit	Nihil
	Tugas dan Tanggung Jawab Komite	Nihil
2.	Komite Pemantauan Kredit	Nihil
	Tugas dan Tanggung Jawab	Nihil
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi	Nihil
	Tugas dan Tanggung Jawab	Nihil

ii. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

No	Nama	NIK	Keahlian	Komite			Pihak Independen (Ya /Tidak)
				Audit	Pemantauan Risiko	Remunerasi Dan Nominasi	
Nihil							

iii. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite	
1	Komite Audit	Nihil
	Program Kerja	Nihil
	Realisasi	Nihil
	Jumlah Rapat	Nihil
2	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite	Nihil
	Program Kerja	Nihil
	Realisasi	Nihil
	Jumlah Rapat	Nihil
3	Komite Remunerasi dan Nominasi	Nihil
	Program Kerja	Nihil
	Realisasi	Nihil
	Jumlah Rapat	Nihil

B. Kepemilikan Saham Anggota Direksi Pada BPR

1. Kepemilikan saham anggota Direksi pada BPR

Direksi BPR Ana Artha tidak memiliki saham pada PT BPR Ana Artha, Lembaga Keuangan Bukan Bank & Perusahaan lainnya.

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Goi Gunawan	3671130506650007	-	-
2.	Resty Ilyas	3275126107880007	-	-

2. Kepemilikan saham anggota Direksi

Direksi BPR Ana Artha tidak memiliki saham pada PT BPR Ana Artha, Lembaga Keuangan Bukan Bank & Perusahaan lainnya :

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Goi Gunawan	3671130506650007	-	-	-
2.	Resty Ilyas	3275126107880007	-	-	-

C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi Dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi Lain dan/atau Pemegang Saham BPR

1. Seluruh Direksi PT. BPR Ana Artha tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Goi Gunawan	3671130506650007	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Resty Ilyas	3275126107880007	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

2. Seluruh Direksi PT. BPR Ana Artha tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Goi Gunawan	3671130506650007	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Resty Ilyas	3275126107880007	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

D. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris Pada BPR dan/atau Perusahaan Lain

3. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris Pada BPR

Dewan Komisaris BPR Ana Artha tidak memiliki saham pada PT BPR Ana Artha.

No	Nama Anggota Dewan Komisari	NIK	Nominal	Persentasi Kepemilikan (%)
1.	Tantina Repi	3674067011640002	-	-
2.	Agus Purnomo Sudyanto	3175070908540003	-	-

4. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris Pada Perusahaan Lain

Dewan Komisaris BPR Ana Artha tidak memiliki saham pada Lembaga Keuangan Bukan Bank & Perusahaan lainnya.

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentasi Kepemilikan (%)
1.	Tantina Repi	3674067011640002	-	-	-
2.	Agus Purnomo Sudyanto	3175070908540003	-	-	-

E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham

1. Seluruh anggota Dewan Komisaris PT BPR Ana Artha tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lainnya, dan Pemegang Saham.

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Dewan Komisaris	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1.	Tantina Repi	3674067011640002	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Agus Purnomo Sudyanto	3175070908540003	Tidak Ada	Tidak ada	Tidak ada

2. Seluruh anggota Dewan Komisaris PT BPR Ana Artha tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, dan Pemegang Saham.

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Dewan Komisaris	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1.	Tantina Repi	3674067011640002	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Agus Purnomo Sudyanto	3175070908540003	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

F. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

Berikut adalah informasi mengenai jumlah remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2023.

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	Rp.252.000.000,-	2	Rp. 324.400.000,-
2.	Tunjangan	-	-	-	-
3.	Tantiem	2	Rp.40.000.000,-	2	Rp. 65.000.000,-
4.	Kompensasi Berbasis Saham	-	-	-	-
5.	Remunerasi Lainnya	2	Rp. 24.300.000,-	2	Rp. 94.250.000,-
	Total		Rp. 316.300.000,-		Rp. 483.650.000,-

Note : * Agus Purnomo Sudiyanto menjabat sampai dengan bulan November 2023

** Resty Ilyas menjabat dari bulan Desember 2023

Fasilitas Lain Untuk Direksi dan Dewan Komisaris Yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	-	-
2.	Transportasi	Mendapat fasilitas kendaraan untuk keperluan operasional.	-
3.	Asuransi Kesehatan	-	-
4.	Fasilitas lainnya	-	-

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukan selama bekerja di BPR Ana Artha. Berikut adalah rasio gaji tertinggi dan terendah:

No.	Keterangan	Perbandingan		
		(a/b)	:	1
1.	rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	2.41	:	1
2.	rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1.67	:	1
3.	rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1.01	:	1
4.	rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi	1.41	:	1
5.	rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	2.25	:	1

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Jumlah rapat Dewan Komisaris pada tahun 2023 adalah 12 Kali

Data Kehadiran Anggota Dewan Komisaris pada Rapat Dewan Komisaris:

No	Tanggal Rapat	Peserta Rapat	Topik/Materi Pembahasan
1	17 Januari 2023	2	Rapat Evaluasi Kinerja Bulan Desember 2022
2	21 Februari 2023	2	Rapat Evaluasi Kinerja Bulan Januari 2023
3	27 Maret 2023	2	Rapat Evaluasi Kinerja Bulan Februari 2023
4	18 April 2023	2	Rapat Evaluasi Kinerja Bulan Maret 2023
5	16 Mei 2023	2	Rapat Evaluasi Kinerja Bulan April 2023
6	10 Juni 2023	2	Rapat Evaluasi Kinerja Bulan Mei 2023
7	10 Juli 2023	2	Rapat Evaluasi Kinerja Bulan Juni 2023
8	24 Agustus 2023	2	Rapat Evaluasi Kinerja Bulan Juli 2023
9	25 September 2023	2	Rapat Evaluasi Kinerja Bulan Agustus 2023
10	23 Oktober 2023	2	Rapat Evaluasi Kinerja Bulan September 2023
11	17 November 2023	2	Rapat Evaluasi Kinerja Bulan Oktober 2023
12	11 Desember 2023	1	Rapat Evaluasi Kinerja Bulan November 2023

Data Kehadiran Anggota Dewan Komisaris pada Rapat Dewan Komisaris:

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekomunikasi	
1.	Tantina Repi	3674067011640002	12	-	100 %
2	Agus Purnomo Sudyanto	3175070908540003	11	-	91,67 %

Note : * Agus Purnomo Sudyanto menjabat sampai dengan bulan November 2023

I. Jumlah Penyimpangan Intern yang Terjadi dan Upaya Penyelesaian oleh BPR

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Total Fraud	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah Diselesaikan		Nihil		Nihil		Nihil		Nihil
Dalam proses penyelesaian internal BPR	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Belum diupayakan penyelesaiannya	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		Nihil		Nihil		Nihil		Nihil

J. Jumlah Permalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh BPR

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	Nihil	Nihil
Dalam Proses Penyelesaian	Nihil	Nihil
Total	Nihil	Nihil

	<h1>LAPORAN TATA KELOLA</h1>
PT BPR ANA ARTHA	
Tahun 2023	

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No	Pihak Yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik, Baik Nominal Maupun Penerima Dana

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

M. Kesimpulan Umum Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan Tata Kelola

Berdasarkan hasil *Self Assessment* pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Ana Artha periode Tahun 2023, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

Nilai Komposisi Tata Kelola sebesar 1,319 dengan prediksi Sangat Baik. Perhitungan penilaian tata kelola secara menyeluruh terlampir.

No	Aspek Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0.200	0.260
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0.150	0.167
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	0.000	0.000
4	Penanganan Benturan Kepentingan	0.100	0.100
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	0.100	0.190
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	0.100	0.188
7	Penerapan Fungsi Audit Extern	0.025	0.025
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko termasuk sistem Pengendalian Intern	0.100	0.128
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit atau BMPK	0.075	0.143
10	Rencana Bisnis / Rencana Strategis Bank	0.075	0.075
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank serta pelaporan internal.	0.075	0.113
Nilai Komposit			1.39
Predikat Komposit			Sangat Baik

Bekasi, 12 Januari 2024

PT BPR Ana Artha




Goi Gunawan **ANA ARTHA** Tantina Repi
Direktur Utama Komisariss Utama